

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021): Desember 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

Pilkada Serentak Sebagai Sarana Mencari Pemimpin Yang **Komunikatif**

Kholid

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Ronngolawe E-mail: kholidunirow@gmail.com

Received: 03 November 2021; Revised: 13 Desember 2021; Accepted: 23 Desember 2021; Published: Desember 2021; Available online: Desember 2021.

Abstract

Direct regional head elections are also included in Law no. 32 Article 56 paragraph 1 concerning Regional Government which states that Regional Heads and Deputy Regional Heads are elected in a pair of candidates which are carried out democratically based on the conditions that democratic elections are elections that are run free and fair (Asfar, 2002: 12). The existence of universal suffrage for adults, meaning that every adult citizen has the right to vote and be elected, second, fairness of voting. There is a fair or just election process. To measure whether an election is run fairly and fairly, the principles of Luber and Justice. Third, there is a special right for political parties to organize and nominate candidates so that voters have many choices to choose between different candidates, both in groups and programs. The success of an organization in achieving its goals cannot be separated from the quality of its leaders. Both private organizations and leaders' public organizations are a necessity. The importance of a leader is at least because first, as a determinant of the direction the organization wants to take to achieve its goals and various goals. Second, mediators, especially in overcoming conflicts that may arise between individuals in a work group and between work groups in the organization they lead. When, integrators, are rational and objective. Fourth, an effective communicator and as a representative of an organization when dealing with outside parties. With various problems and challenges Direct elections for political parties must actually carry out open recruitment because this is one of the conditions for upholding democratic principles. Recruitment is open, meaning that any citizen who has quality indiscriminately has the same right to become a candidate for regional head even though he lacks capital. Unlike now where candidates for regional heads are dominated by people who have large capital, but quality measures are numbered behind. As a consequence, political parties must facilitate regional head candidates to obtain funds so that communicative leaders will be born who are not held by group interests, especially political parties.

Keywords: Pilkada, Leader, Communicative



Pendahuluan

Pilkada secara langsung merupakan amanat UUD 1945 meskipun tidak secara eksplisit UUD 1945 menyebutkan Pilkada dilaksanakan secara Langsung. Namun UUD 1945 hanya menyebut bahwa kepala daerah harus "dipilih secara demokratis". Penyebutan istilah "dipilih secara demokratis" menjadi pilihan. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga tercamtum dalam UU No. 32 Pasal 56 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan demokratis berdasarkan asas secara Jurdil. Luber dan Pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi saja yang memungkinkan sebagai wahana pendidikan politik rakyat atau sebagai wahana terpilihnya pemimpin yang Transformatif sekaligus terwujudnya pemberdayaan politik rakyat.

Diputuskannya Pilkada Langsung diklaim oleh banyak ilmuan politik dan pemerintah memiliki sejumlah asumsi dan argumen. Pertama, dengan pemilihan secara langsung diharapkan mampu memutus mata rantai oligarkhi Politik yang selalu mendominasi kehidupan partai politik di DPRD selama ini (Syamsudin Haris, 2004: 2). Sebelum dilaksanakan Pilkada Langsung pemilihan kepala daerah dimanipulasi dengan oleh politik partai mengatasnamakan kepentingan rakyat. Pilkada Langsung diharapkan mampu menghindari adanya klaim dari partai politik.

Kedua. meningkatkan local accountability para elit, termasuk kepalakepala daerah (Syamsudin Haris, 2004: 2). Pemilihan kepala Daerah yang dilaksanakan secara perwakilan yang di wakili oleh anggota DPRD cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah kepada DPRD. Konsekuensinya kepala daerah lebih bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kepentingan **DPRD** yang memilih anggota dibandingkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itulah pemilihan kepala daerah perlu diganti menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

menciptakan stabilitas Ketiga, politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal (Syamsudin Haris, 2004: 3). Semenjak tahun 1999 terjadi penguatan peran dan fungsi legislatif di daerah terutama fungsi dan peran pengawasan atau kontrol yang dominan ditandai adanya pemberhentian kepala daerah di



Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

tengah masa jabatan. Hal ini menjadikan DPRD seakan menjadi penguasa tunggal yang menentukan nasib kepala daerah. Keadaan ini tentu berdampak pada munculnya konflik politik lokalantara kepala daerah dan anggota DPRD bersama pendukung masing masing. Dengan Pilkada Langsung diharapkan fenomena di atas dapat dihindari karena para kepala daerah dapat melaksanakan tugasnya selama masa jabatannya belum habis tanpa harus bergantung kepada DPRD.

Keempat, lebih meningkatkan kualitas partisipasi serta kedaulatan rakyat di satu pihak dan keterwakilan elit di pihak lain, karena rakyat menurut Eep Saifulloh Fattah diberikan kepercayaan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpinnya, bukan sebagai identitas statistik yang pasif. (Kompas, 2005: 40)

Persoalannya kemudian adalah Apakah Pilkada langsung mampu menghasilkan pemimpin yang tranformatif? dan apakah Pilkada membangun langsung mampu masyarakat otonom yang mampu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pilkada Langsung

Pilkada adalah Pemilu (Ramlan Surbakti, 2005: 4). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Pilkada) belum menggambarkan bahwa Sistem politik yang di anut adalah sisitem poitik Demokratis, hal ini bisa di lihat dari tidak hanya negara negara yang menganut sistem demokratis yang melaksanakan pemilu. Negara Negara yang menganut ini masih belum cukup kuat untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Ini bisa dilihat dari semua sistem politik liberal, sistem komunis, otoriter melaksanakan sistem juga Pemilu. Pemilu dalam negara-negara otoriter tentu hanya sebagai alat legitimasi penguasa atau alat untuk melestarikan status-quo. Pemilu semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik yang baik.

Pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi saja yang memungkinkan sebagai wahana pendidikan politik rakyat atau sebagai wahana terpilihnya pemimpin yang kompeten sekaligus terwujudnya pemberdayaan politik rakyat .Syarat Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang dijalankan secara free dan fair

(Asfar, 2002: 12). Atau dengan kata lain adanya peluang dari masyarakat untuk melaksanakan righ to vote and to be candidate secara adil (Isro, 2005: 4-5) sehingga tercipta suatu pemilu yang kompetitif, jujur dan adil.

Menurut Ozbudun (1997: 393-422) Pemilu yang baik dan kompetitifitif bisa tercapai apabila ada tiga komponen. Pertama, universal adult suffrage. Adanya hak pilih universal bagi orang dewasa, artinya setiap warga negara dewasa mempunyai hak pilih dan dipilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, golongan, ideologi, kekayaan, pendidikan dan sebagainya. Hak pilih ini digunakan untuk dua pemilihan, (1) pemilihan untuk pejabat eksekutif baik di pusat maupun di daerah dan (2) pemilihan kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan.

Kedua, fairness of voting. Adanya proses pemilihan yang fair atau adil. Untuk mengukur apakah suatu Pemilu dijalankan secara fair dan adil maka perlu dicermati indikator berikut, (1) secret bollot yaitu adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan yang secara eksplisit dalam undang-undang Pemilu, (2) open keterbukaan dalam counting, yaitu penghitungan suara. Semua rakyat mempunyai akses dan berhak untuk mengetahui prosesnya. (3) absence of electoral fraud, yaitu tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan baik ditingkat pendaftaran, kampanye, pencoblosan sampai pada tingkat perhitungan suara, (4) absence of veolence artinya tidak adanya kekerasankekerasan baik kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan pemerintah, partai politik peserta Pemilu maupun para Pemilu, (5) absence of intimidation, tidak adanya intimidasi terutama dalam proses pemilihan dan pencoblosan. (Asfar, 2002: 14), (6) absence of mobilization, artinya tidak adanya mobilisasi pemilih oleh pemerintah, partai politik atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan terutama dalam proses pemilihan dan pencoblosan.

Ketiga, adanya hak khususnya bagi Parpol untuk mengorganisasi dan mengajukan para kandidat sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk memilih diantara para calon yang berbeda baik secara kelompok maupun program-programnya. Hak ini menyiratkan dua persyaratan; (1) Pemilu haruslah memberikan keleluasaan



Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021): Desember 2021

Parpol secara otonom untuk membuat regulasi tanpa intervensi dari manapun; (2) menghilangkan berbagai aturan yang membatasi kelompok-kelompok bisa tertentu baik karena ideologi maupun orientasi kebijakan untuk terlibat dalam proses pemilihan. (Asfar, 2002: 12)

Kepemimpinan

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidaklah bisa dilepaskan dari kualitas pemimpinnya. Baik organisasai privat terlebih organisasi publik pemimpin merupakan suatu keniscayaan. Pentingnya seorang pemimpin paling tidak karena pertama, sebagai penentu arah yang hendak ditempuh organisasi usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Kedua, mediator, khususnya dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul antara individu dalam satu kelompok kerja dan antara kelompok kerja yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya. Ketika, integrator, yang rasional dan obyektif. Keempat, komunikator yang efektif dan sebagai wakil dari sebuah organisasi ketika berhubungan dengan pihak luar.

Adanya pimpinan dalam suatu organisasi tidaklah cukup untuk mengantarkan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor yang lebih penting adalah kompetensi pimpinannya, lebih-lebih organisasi sektor publik. Karena sektor publik tidak sesederhana dan sejelas sektor privat. Sektor publik disamping lebih luas cakupannya, juga tujuan yang diemban tidak sekongkrit sektor privat. Kalau sektor privat tujuannya jelas, untuk mendapatkan keuntungan (efisiensi) yang sebesarsektor publik besarnya, sedang disamping memandang perlunya efisiensi dan efektivitas maka juga tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan. kedaulatan rakyat, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan akuntabilitas.

Nilai-nilai tersebut hampir belum dapat direalisasikan oleh organisasi publik lebih negara-negara dunia ke tiga. Persoalaanya sekarang adalah megapa nilai-nilai efisiensi. efektifitas. humanisme seperti keadilan, kedaulatan perlindungan hak-hak rakyat, asasi akuntabilitas manusia dan sulit terealisasikan? Apa sebenarnya problem organisasi publik dan apa kendalakendalanya?

Inu Syafi'i Kencana mengidentifikasi problem organisasi publik dalam enam bagian yaitu masih suburnya budaya feodalisme. instruksional, loyalitas pada atasan,

disorientasi, service publik bukan publik service dan sistem rekruitmen yang tertutup.

Kalau disederhanakan sebenarnnya problem organisasi publik berakar pada tiga akar masalah yaitu faktor gaya kepemimpinan, budaya organisai dan teknik kepemimpinan dimana ketiga komponen ini membentuk sebuah kompetensi seorang pemimpin.

Pertama, gaya kepemimpinan. Potret gaya kepemimpinan di negaranegara sedang berkembang masih di dominasi gaya otokratis dan birokratis dan meninggalkan gaya kepemimpinan bebas demokratis. dan Gaya kepemimpinan otokratis berimplikasi sistem instruktif dal mengambil dilarangnya inisiasi dari kebijakan. anggota masyarakat. Pada sisi yang sama intimidasi dan munculnya paksaan dalam setiap pelaksanaan kebijakan.

Gaya kepemimpinan birokratis menghadirkan tatanan organisasi yang formalitas, kaku, orientasi pada atasan, berpegang teguh pada "aturan" bukan pada misi organisasi. Muaranya lahirnya organisasi publik bukan mampu menyelesaikan masalah rakyat tetapi menjadi masalah itu sendiri.

Kedua. budaya organisasi. Pemimpin di dunia ketiga adalah raja yang menganggap selalu benar yang diucapkan dan dilakukan. Oleh karena itu wajib ain bagi rakyat untuk "menyembah" dan mentaati kebijakan yang diambilnya meskipun nyata-nyata tidak masuk akal (reasonable), tidak rasional dan salah seperti korupsi. Pada sisi lain budaya melayani bukan pada rakyat tetapi pada penguasa serta loyalitas kepada penguasa adalah budaya yang masih melekat.

Ketiga, Teknik kepemimpinan, yang sering di praktekkan adalah bukan komunikasi dua arah, bukan persuasif, bukan motivasi dan bukan keteladanan yang baik tetapi lebih cenderung pada komunikasi searah, punisment (bukan berdasarkan pada konsekwensi) dan keteladanan buruk. Melihat yang kekacauan dan carut-marut organisasi terutama organisasi weberian dalam negara sedang berkembang salah satu agenda mendesak harus vang diperjuangkan adalah harus memiliki pemimpin yang kompeten.

Kemampuan seorang pimpinan publik dalam menyampaikan ide, sikap, nilai-nilai kepada pegawainya. Peran dari berkomunikasi kemampuan seorang pemimpin tidak boleh dianggap kecil



Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021): Desember 2021

karena paling tidak memiliki makna (1) sebagai motivasi para pegawai untuk bekerja secara tekun dan giat, (2) sebagai ekspresi emosi pimpinan, (3) sebagai penyampaian informasi, dan (4) sebagai pengendalian perilaku pegawai.

Kepemimpinan Komunikatif

Kepemimpinan komunikatif akan lahir dari gaya kepemimpinan yang demokratis, dimana pemimpin yang demokrtis akan selalu berusaha membangkitkan setiap anggota organisasi untuk berperanaktif tujuan organisasi. membangkitkan untuk partisipasi aktif anggota organisasi dalam mencaapai tujuan seorang pemimpin harus mempunyai kompetensi kepemimpinan terutama kompetensi kompetensi komunikasi merupakan dasar seorang pemimpin karena akan memiliki makna sebagai motivator atau penggerak para pegawai untuk bekerja secara tekun dan giat.

Ide dan gagasan pemimpin hanya bisa disampaikan kepada anggota organisasi melalui komunikasi yang efektif untukitu seorang pemimpin harus juga sebagai komunikator yang baik disamping itu juga kemampuan berkomunikasi bagi pemimpin merupakan ekspresi emosi pimpinan, sebagai bentuk penyampaian informasi dan ide serta gagasan , juga berfungsi sebagai pengendalian perilaku pegawai.

Pemimpin yang komunikatif akan mampu mengerakakn anggota organisasi untukmencapai tujuan dengan efektif dimana onggota organisasi tidak pernah merasa dipaksa atau diperintah oleh atasan atau pemimpin, karena pemimpin mampu memerankan komunikasi yang seorang komunikator baik sebagai dengan tehnik persuasi yang baik.

Dalam memerankan komunikator yang baik sorang pemimpin akan mampu menjadi *satu* One Of Us yang berarti pemimpin adalah salah satu dari kita yang mampu mencerminkan perilaku dan watak dari kelompok atau organisasinya. Kedua The Most Of Us dimana pemimpin bukan hanya bagian darikelompoknya tetapi pemimpin juga harus mampu membawa anggota kelompok untuk mentaati aturan dan norma yang ada. *Ketiga* The Great Of Man bahwa pemimpin adalah orang yang kewibawaan mempunyai dan dankehormatan yang besar di depan para anggota kelompoknya.

Pemimpin organisasiatau kelompok mencapai ketiga hal tersebut jika pemimpin mampu menunjukkan aktifitas kepemimpinannya melalui kemampuan berkomunikasi yang baik,

dimana pemimpin menunjukkan kepada anggotanya dengan komunikasi simbolik dalam hal ini adalah teladan dalam menjaga nilai dan norma kelompoknya serta dalam mengerakkan angota dalam mencapai tujuan, sehingga anggota tidak merasa diperintah oleh atasan atau pemimpin dalam melakukan aktifitas organisasi

Pemimpin organisasi juga harus mampu melakukan komunkasi persuasif agar anggota meyakinni bahwa pemimpin berasal dari bagian kelompok yang merupakan bagian dari kelompok serta merupakanorang besar dan berwibawa dalam kelompok.

Penutup

Pilkada langsung merupakan amanat dari uu, dan merupakan perwujudan bahwa Indonesia merupakan demokrasi. negara Demokrasi diyakini dan dipercaya merupakan sistem politik terbaik yang sudah diakui oleh negara negara di Dunia. Dengan pilkada langsung yang diselenggarkan ditingkat daerah dalam rangka mencari pemimpin daerah yang banyak berkompeten, meskipun tantangan dan hambatan dalam implementasinya.

Dengan berbagai permasalahan dan tantangan Pilkada langsung parpol harus benar-benar melaksanakan rekruitmen terbuka karena ini merupakan salah satu syarat tegaknya prinsip demokrasi. Rekruitmen bersifat terbuka, artinya siapa saja warga negara yang memiliki kualitas tanpa pandang bulu, mempunyai hak sama untuk menjadi bakal calon kepala daerah meskipun kurang memiliki modal. Tidak seperti sekarang dimana calon-calon kepala daerah di dominasi oleh orangorang yang memiliki modal besar, tetapi ukuran kualitas dinomor belakangkan.

Konsekuensinya Parpol harus memfasilitasi calon kepala daerah untuk mendapatkan dana. Ini yang terjadi di Amerika Serikat. Ketika Hillary Rodham Clinton maju sebagai senator, pencarian dana dimotori dan difasilitasi oleh Parpol sehingga calon senator tidak usah mengeluarkan modal yang harus dikembalikan saat meraih jabatan.

Proses ini cukup penting, disamping mewujudkan right to vote and to be candidate secara adil terciptanya Pemilu yang kompetitif juga potensial mencegah intervensi elit partai (Atas Nama Dewan Pengurus Pusat) dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. Langkah ini kiranya cukup



Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

mendesak karena yang kita cemaskan adalah kalau ada yang berminat menjadi kepala daerah dan kebetulan mempuanyai modal yang cukup maka mereka cukup mendekati DPP partai tanpa harus "berkeringat" di daerah.

Bukan rahasia negara ini masih sangat minim pemimpin publik yang kompeten. Mungkin krisis bangsa ini vang sampai sekarang tidak kunjung redah ini salah satu faktor yang terpenting adalah bangsa ini masih belum memiliki pemimpin publik yang kompeten. Dari tujuh kompetensi di atas yakni kompetensi memanage diri sendiri, memanage komunikasi, memanage kemajemukan, memanage etika. kompetensi memanage tim, memanage keragaman budaya, dan kompetensi memanage perubahan belum dimiliki secara maksimal oleh putra-putra bangsa indonesia. Lebih-lebih memanage etika komunikasi dan memanage masih menjadi masalah yang serius. Moral pemimpin publik masih sangat rendah dibuktikan dengan praktek korupsi yang merajalela. Pemimpin publik masih terlihat lebih mementingkan kepentingan pribadi golongan dan sehingga akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, kesenjangan sosial tidak megalami

perubahan kualitas hidup yang signifikan.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana stratregi menghasilkan pemimpin publik yang kompeten? Bangsa ini telah sepakat memilih dan menerapkan sistem politik demokratis. Mungkinkhah sistem politik demokratis mampu menghasilkan pemimpin publik yang kompeten? Bukankah pemimpin publik dipilih langsung oleh rakyat? Apakah ada korelasi yang signifikan kehendak rakyat antara dengan kompetensi seorang pemimpin publik? Dalam iklim demokrasi seperti sekarang bagaimana cara memilih pemimpin yang kompeten?

Ini adalah masalah yang perlu diskusi lebih lanjut, tetapi paling tidak untuk menghasilkan pemimpin publik non-politis yang kompeten dan komunikatif di dalam pemerintahan daerah yang mendesak yang harus dilakukan adalah reformasi sistem rekruitmen. Sebuah sistem rekruitmen yang transparan (terbuka), mengedepankan kemampuan pemimpin yang memiliki kemampuan kognitif yang mendalam dan skill bukan karena lamanya kerja.

Pada sisi lain untuk menghasilkan pemimpin publik yang kompeten dan komunikatif di jabatan politik, solusi yang bisa ditawarkan untuk dapat memilih pemimpin adalah rakyat minimal harus mengetahui latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, etika dan track record dalam masyarakat. Tanpa itu pemimpin publik hanya dipenuhi oleh elit ekonomi yang kompetensinya diragukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Mohamamad. 2002. Model-model Pemilihan di Indonesia. Pusat Study dan Ham dengan partner ship for government reform in Indonesia. Surabaya.
- Corry JA and Henry J Abraham. *Element of* Democratic Government, Oxford Unvercity Press.
- Affan. 2002. Politik Indonesia Gafar, Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Crutchfield., Krech dan ballachev.1962. Individual In Society. Mc Graw-Hill.Kogakhusa,LTD Tokyo
- Haris, Syamsudin. 2005. Masalah dan Strategi mensukseskan Pilkada Makalah Langsung. yang disampaikan pada forum komunikasi alumni institut ilmu pemerintahan Mei 2005 Jakarta.

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

Isro, Sadli. 2005. Menuju Pilkada yang *Demokratis*. Kompas: Jakarta.

Kompas, 1 Maret 2005

Kompas, 17 Maret 2005

Kumorotomo, Wahyudi, 2005, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Media Indonesia, 07 April 2005

- Osborne, David dan Tet Gaebler, 1996, Reiventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Transforming The Public Sector, Mewirausahakan Birokrasi Abd Rosyid, Pustaka (terj.) Binaan Pressindo, Jakarta.
- Ozbudun, Ergun. 1977. Institutionalizing Competitive Election in dalam Developing Societies. Myron Weiner and Ergun Ozbudun (ed) competitive election in developing countries, doke Univercity Press.
 - Roth, David F. 1980. and Frank L Wilson. The Comparative Study of Politic prentice-Hall. Englewood Cliffs.
- Setiyono, Budi, 2004, Birokrasi dalam Perspektif Politik dan



Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

Administrasi, Puskodak FISIP Undip, Semarang.

- Setiyono, Budi, 2005, Accountability and Ethic Management Morallity In Public Sector, Bahan Mata Kuliah Manajemen Publik, Magister Ilmu Politik, Undip Semarang.
- Siagian, Shondang, PS, 1999, Teori dan Praktik Kepemimpinan, Rineka Cipta Jakarta.
- Silitonga, Bonget. 2005. Pilkada dan Pembajakan Demokrasi. Kompas: Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2005. Pilkadal adalah Pemilu. Kompas. Jakarta.
- Syafi, Inu Kencana, 2006, Kepemimpinan PT Pemerintahan Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Walker, Michael. 1995. Toward a Global Civil Society. Providen RI, Bergham Books.

Warella, 2005, Kompetensi Pimpinan Publik, Bahan Mata Kuliah Manajemen Publik, Magister Ilmu Politik, Undip Semarang.

